

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA (BLT-DD) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN: ANALISIS
KETEPATAN SASARAN DI KABUPATEN NGANJUK**

Ana Nafisatin Ilma

Universitas Negeri Surabaya
25040674211@mhs.unesa.ac.id

Nabila All Anjari

Universitas Negeri Surabaya
25040674184@mhs.unesa.ac.id

Firre An Suprpto

Universitas Negeri Surabaya
firresuprpto@unesa.ac.id

Indah Prabawati

Universitas Negeri Surabaya
indahprabawati@unesa.ac.id

ABSTRAK

Kemiskinan tetap menjadi tantangan pembangunan multidimensional yang krusial, termasuk di wilayah Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan mengevaluasi ketepatan sasaran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam kerangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Nganjuk. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data bersumber dari literatur ilmiah, regulasi pemerintah, serta data statistik resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait yang dianalisis menggunakan teknik analisis isi dan sintesis literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun angka kemiskinan di Kabupaten Nganjuk mengalami tren penurunan hingga mencapai 10,17 persen pada Maret 2024, jumlah penduduk rentan masih signifikan. Implementasi BLT-DD secara operasional telah berjalan melalui mekanisme Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dengan tren penurunan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari 27.842 pada tahun 2021 menjadi 19.862 pada tahun 2024. Ditinjau dari teori George C. Edward III, variabel komunikasi dan sumber daya manusia masih memerlukan optimalisasi guna menjamin efektivitas program. Meskipun secara umum dinilai cukup tepat sasaran, tantangan berupa inclusion error dan exclusion error masih ditemukan akibat fluktuasi kondisi ekonomi dan kendala pembaruan data kesejahteraan sosial. Program ini terbukti memberikan dampak positif jangka pendek terhadap daya beli rumah tangga, namun memerlukan integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi untuk menciptakan kemandirian masyarakat yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Kemiskinan, BLT Dana Desa, Ketepatan Sasaran, Kabupaten Nganjuk, Implementasi Kebijakan.*

ABSTRACT

Poverty remains a crucial multidimensional development challenge, including in Nganjuk Regency. This study aims to analyze the implementation and evaluate the targeting accuracy of the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD) Program within the framework of poverty alleviation in Nganjuk Regency. The research method used is descriptive qualitative with a library research approach. Data sourced from scientific literature, government regulations, and official statistical data from the Central Statistics Agency (BPS) and related agencies were analyzed using content analysis and literature synthesis techniques. The results show that although the poverty rate in Nganjuk Regency experienced a downward trend, reaching 10.17 percent in March 2024, the number of vulnerable populations remains significant. The operational implementation of BLT-DD has been carried out through the Special Village Deliberation (Musdesus) mechanism, with a decreasing trend in the number of Beneficiary Families (KPM) from 27,842 in 2021 to 19,862 in 2024. Based on George C. Edward III's theory, communication and human resource variables still require optimization to ensure program effectiveness. Although generally considered well-targeted, challenges such as inclusion and exclusion errors were still encountered due to fluctuating economic conditions and difficulties updating social welfare data. This program has been shown to have a positive short-term impact on household purchasing power, but requires integration with economic empowerment programs to create sustainable community independence.

Keywords: *Poverty, Village Fund Direct Cash Assistance, Targeting Accuracy, Nganjuk Regency, Policy Implementation.*

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan fenomena pembangunan yang bersifat kompleks dan multidimensional, sehingga senantiasa menjadi prioritas utama dalam agenda kebijakan nasional di Indonesia. Persoalan ini tidak hanya berfokus pada ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan primer, namun juga mencakup keterbatasan akses terhadap sektor pendidikan, layanan kesehatan, peluang kerja, serta partisipasi sosial ekonomi. Sejalan dengan agenda global Sustainable Development Goals (SDGs) poin pertama mengenai pengentasan kemiskinan, pemerintah telah mengintegrasikan berbagai program perlindungan sosial sebagai instrumen strategis untuk menjaga kesejahteraan sekaligus memitigasi kerentanan ekonomi masyarakat (Suparman, 2021).

Dalam lingkup regional, tingkat kemiskinan di Kabupaten Nganjuk masih menjadi isu krusial dalam pembangunan daerah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa meskipun terdapat tren penurunan jumlah penduduk miskin dari 115,86 ribu jiwa (10,89 persen) pada Maret 2023 menjadi 108,37 ribu jiwa (10,17 persen) pada Maret 2024, angka tersebut masih menunjukkan adanya ratusan ribu penduduk dengan kondisi ekonomi rentan. Fenomena ini menegaskan urgensi intervensi kebijakan yang memiliki tingkat presisi tinggi agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.

Salah satu instrumen perlindungan sosial yang diterapkan adalah Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Program ini mengalokasikan Dana Desa untuk memberikan bantuan tunai guna menjaga daya beli masyarakat, meringankan beban pengeluaran, serta memperkuat ketahanan ekonomi di tingkat perdesaan. Karakteristik utama BLT-DD adalah sifatnya yang desentralistik, di mana proses identifikasi, penetapan, hingga distribusi penerima manfaat dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah desa. Oleh sebab itu, efektivitas program ini sangat bergantung pada kualitas tata kelola desa, akurasi data sosial ekonomi, serta kapasitas aparatur desa setempat (Setyaningrum, 2023).

Walaupun diskursus mengenai BLT-DD telah banyak dilakukan, mayoritas kajian cenderung berfokus pada dampak ekonomi makro atau efektivitas program secara umum. Penelitian yang secara spesifik menganalisis ketepatan sasaran serta faktor-faktor determinannya dalam konteks wilayah tertentu, seperti Kabupaten Nganjuk, masih relatif terbatas. Mengingat dinamika kemiskinan di Nganjuk yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi regional, analisis terhadap implementasi BLT-DD menjadi sangat strategis untuk dilakukan guna menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini difokuskan pada analisis implementasi dan evaluasi ketepatan sasaran Program BLT-DD di Kabupaten Nganjuk. Melalui pendekatan studi kepustakaan yang merujuk pada literatur ilmiah dan data resmi pemerintah, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi penyaluran bantuan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian kebijakan publik terkait perlindungan sosial berbasis desa, sedangkan secara praktis diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi otoritas daerah dalam meningkatkan transparansi dan akurasi tata kelola bantuan agar lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Implementasi Kebijakan

Dalam diskursus administrasi publik, kebijakan dipahami sebagai seperangkat ketentuan yang dicirikan oleh perilaku konsisten dan berulang, baik dari pihak pembuat kebijakan maupun pelaksana yang mematuhi (Herabudin, 2016). Implementasi merupakan tahapan strategis yang krusial setelah perumusan kebijakan, karena pada fase inilah sebuah kebijakan diuji secara substansial mengenai tingkat efektivitas dan keberhasilannya di lapangan (Dunn, 1994). Salah satu kerangka analisis yang relevan adalah model George C. Edward III, yang mengidentifikasi empat variabel utama penentu keberhasilan implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, di mana keempatnya saling berinteraksi dalam menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan publik (Makmur, 2023).

Konsep dan Tipologi Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan individu atau rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan dasar hidup yang layak. Mubyarto (1998) menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan situasi kekurangan sistemik yang disebabkan oleh keterbatasan modal, rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan, produktivitas yang minim, serta terbatasnya akses dalam

partisipasi pembangunan. Lebih lanjut, merujuk pada pemikiran Chambers dalam Nasikun (2021), kemiskinan diklasifikasikan ke dalam empat bentuk utama:

- 1) Kemiskinan Absolut: Kondisi di mana pendapatan berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum.
- 2) Kemiskinan Relatif: Ketimpangan pendapatan akibat kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.
- 3) Kemiskinan Kultural: Persoalan sikap dan mentalitas, seperti rendahnya etos kerja, yang berakar pada faktor budaya.
- 4) Kemiskinan Struktural: Kemiskinan yang terpelihara akibat rendahnya akses terhadap sumber daya dalam sistem sosial, budaya, dan politik yang tidak memihak pada upaya pengentasan kemiskinan.

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Implementasi BLT-DD secara yuridis berpijak pada regulasi pemerintah, di antaranya Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020, serta Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022 mengenai prioritas penggunaan Dana Desa. Sebagai instrumen perlindungan sosial, program ini bertujuan untuk mereduksi beban ekonomi, menjaga stabilitas daya beli, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam kerangka pengentasan kemiskinan (Ririn & Suryani, 2021). Penetapan penerima manfaat dilakukan secara selektif melalui mekanisme Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan tokoh masyarakat dengan merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta verifikasi faktual untuk memastikan bantuan diberikan kepada rumah tangga yang kehilangan mata pencaharian atau belum tersentuh bantuan sosial lainnya.

Ketepatan Sasaran

Akurasi penentuan target merupakan fundamental dalam keberhasilan program bantuan sosial. Menurut Coady, Grosh, dan Hoddinott (2004), ketepatan sasaran diukur dari kemampuan pemerintah dalam mengidentifikasi kelompok paling rentan melalui mekanisme seleksi yang ketat. Dalam praktiknya, terdapat dua risiko kesalahan utama, yaitu Inclusion Error (penerima manfaat yang tidak memenuhi kriteria) dan Exclusion Error (masyarakat layak yang terabaikan dari bantuan). Ketidakefektifan ini umumnya dipicu oleh beberapa determinan, seperti rendahnya akurasi data kemiskinan, proses verifikasi yang kurang optimal, serta lemahnya koordinasi antar-lembaga pelaksana (Nisak & Satar, 2023).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif melalui metode studi kepustakaan (library research). Tujuan utama dari metode ini adalah untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam kerangka pengentasan kemiskinan, dengan fokus spesifik pada analisis ketepatan sasaran penerima manfaat di wilayah Kabupaten Nganjuk.

Data yang digunakan dalam kajian ini merupakan data sekunder yang dihimpun dari berbagai literatur ilmiah dan dokumen otoritatif. Sumber data mencakup artikel jurnal ilmiah yang terindeks SINTA, buku-buku referensi

mengenai kebijakan publik, serta dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan data dari situs resmi berbagai lembaga negara, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nganjuk, Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk, Kementerian Desa PDTT, dan Kementerian Keuangan, termasuk berbagai instrumen regulasi yang mendasari pelaksanaan BLT Dana Desa. Data statistik sekunder dari BPS dan instansi terkait juga didayagunakan sebagai instrumen pendukung untuk memperkuat validitas analisis.

Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis pada basis data akademik seperti Google Scholar dan portal SINTA. Proses pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci relevan, antara lain "implementasi BLT Dana Desa", "bantuan sosial", dan "pengentasan kemiskinan". Adapun teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan sintesis literatur. Melalui prosedur ini, temuan-temuan dari penelitian terdahulu diintegrasikan dan dibandingkan secara komprehensif guna mengidentifikasi pola implementasi serta tingkat ketepatan sasaran program BLT-DD dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kemiskinan di Kabupaten Nganjuk

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki karakteristik ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, serta usaha kecil menengah. Struktur ekonomi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat masih memiliki tingkat kerentanan ekonomi yang cukup tinggi, terutama ketika terjadi fluktuasi harga komoditas pertanian maupun perubahan kondisi ekonomi regional.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, tingkat kemiskinan di daerah ini menunjukkan dinamika dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada tabel berikut.

Tahun	Garis Kemiskinan/GK (rupiah per kapita sebulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)
2021	446.232	125,53	11,85
2022	474.429	113,63	10,70
2023	513.565	115,86	10,89
2024	539.714	108,37	10,17
2025	561.807	107,30	10,06

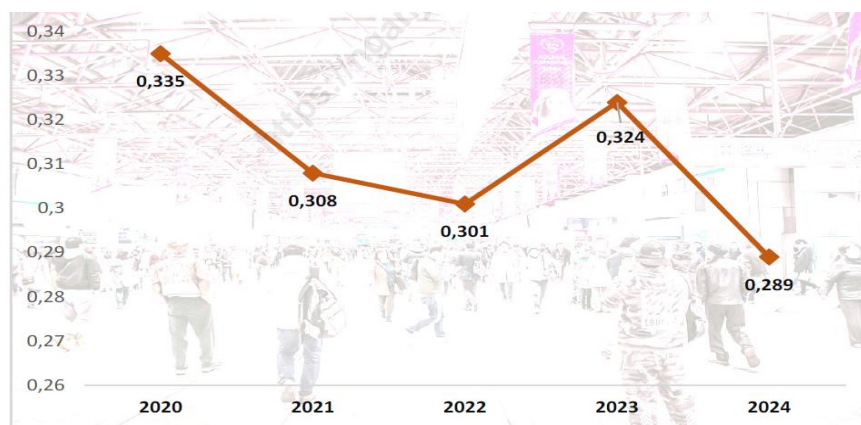
Gambar 1. Tren Kemiskinan Kabupaten Nganjuk Tahun 2021–2025

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun terakhir (2021–2025) cenderung fluktuatif. Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2025 sebesar 107,30 ribu jiwa, dibanding tahun 2024 turun sebesar 1,07 ribu jiwa atau turun sebesar 0,98 persen. Artinya, dari setiap 100 penduduk di Kabupaten Nganjuk, sekitar 10 orang berada dalam kategori miskin. Garis kemiskinan Kabupaten Nganjuk mengalami peningkatan antar waktu selama 2021–2025, pada tahun 2021 garis kemiskinan Kabupaten Nganjuk sebesar Rp 446.232 dan terus meningkat hingga mencapai Rp. 561.807 pada tahun 2025. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nganjuk selama tahun 2021–2025 masih fluktuatif tetapi pada tiga tahun terakhir cenderung mengalami tren menurun.

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020–2021 menjadi salah satu faktor meningkatnya penduduk miskin. Pemberlakuan PPKM, membuat aktivitas perekonomian terbatas. Banyak pekerja yang dirumahkan imbas dari kebijakan pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19. Tahun 2022 perekonomian mulai pulih pasca pandemi, sehingga Jumlah penduduk miskin turun menjadi 113,63 ribu jiwa dibandingkan tahun 2021 sebesar 125,53 ribu jiwa.

Selain ditampilkan dalam bentuk tabel, tren kemiskinan tersebut juga dapat dilihat melalui grafik berikut.



Gambar 2. Tren Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Nganjuk Tahun 2021–2025

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk

Grafik tersebut menunjukkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan mulai terlihat secara signifikan setelah tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa berbagai kebijakan perlindungan sosial yang dilakukan pemerintah memiliki peran dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rumah tangga miskin. Meskipun demikian, penurunan angka kemiskinan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi kesejahteraan yang stabil, karena tingkat kerentanan ekonomi masyarakat masih cukup tinggi sehingga memerlukan intervensi kebijakan yang tepat sasaran.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga. Salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk membantu

masyarakat miskin di tingkat desa adalah Program BLT-DD yang bertujuan untuk memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dan rentan miskin.

Implementasi Program BLT Dana Desa di Kabupaten Nganjuk

Salah satu kebijakan perlindungan sosial yang berperan dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat desa adalah Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Program ini memberikan bantuan tunai kepada masyarakat miskin yang bersumber dari dana desa dan dikelola oleh pemerintah desa.

Penetapan penerima bantuan dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa khusus yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta unsur masyarakat. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada rumah tangga yang benar-benar membutuhkan.

Data BLT Dana Desa yang dianalisis dalam penelitian ini menggunakan periode hingga tahun 2024 karena data realisasi program bantuan sosial pada tahun 2025 belum dipublikasikan secara lengkap oleh pemerintah daerah maupun kementerian terkait.

Perkembangan jumlah penerima BLT-DD di Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Desa dan Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD di Kabupaten Nganjuk

Tahun	Jumlah Desa	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
2021	264	27.842
2022	264	25.316
2023	264	21.547
2024	264	19.862

Sumber: Rekapitulasi penyaluran BLT-DD Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah penerima bantuan BLT-DD di Kabupaten Nganjuk mengalami penurunan secara bertahap dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 jumlah penerima bantuan tercatat sekitar 27.842 keluarga penerima manfaat. Jumlah tersebut menurun menjadi 25.316 keluarga pada tahun 2022, kemudian menjadi 21.547 keluarga pada tahun 2023 dan sekitar 19.862 keluarga pada tahun 2024. Penurunan jumlah penerima bantuan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan kriteria penerima bantuan, perbaikan kondisi ekonomi masyarakat, serta pembaruan data kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Tabel 2. Besaran Bantuan BLT-DD

Tahun	Besaran Bantuan Per Bulan (Rp)	Jumlah Bulan	Total Per KPM
2021	300.000	12	3.600.000
2022	300.000	12	3.600.000
2023	300.000	12	3.600.000
2024	300.000	12	3.600.000

Sumber: Peraturan Menteri Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Program BLT DD memberikan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan kepada setiap keluarga penerima manfaat. Bantuan tersebut diberikan selama satu tahun anggaran sehingga setiap keluarga penerima memperoleh bantuan sebesar Rp3.600.000 per tahun. Bantuan tunai ini diharapkan dapat membantu rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar serta menjaga daya beli masyarakat desa.

Hubungan Antar Tabel dalam Analisis Penelitian

Analisis terhadap implementasi kebijakan BLT-DD dalam penelitian ini didasarkan pada integrasi tiga tabel data yang saling berkaitan secara fungsional. Tabel 1 menyajikan gambaran objektif mengenai kondisi dan dinamika kemiskinan di Kabupaten Nganjuk, yang berfungsi sebagai landasan fundamental dalam memahami urgensi intervensi kebijakan perlindungan sosial di daerah tersebut. Selanjutnya, Tabel 2 menguraikan aspek operasional kebijakan melalui jumlah KPM yang terjangkau, yang merefleksikan bagaimana bantuan didistribusikan kepada sasaran di tingkat desa.

Sementara itu, Tabel 3 memaparkan rincian besaran bantuan finansial yang diterima oleh setiap keluarga untuk mengevaluasi sejauh mana intervensi tersebut mampu meringankan beban pengeluaran rumah tangga miskin. Sinergi informasi dari ketiga tabel ini menegaskan bahwa BLT-DD berperan krusial dalam mereduksi tekanan ekonomi masyarakat. Meskipun tren penurunan jumlah penerima mengindikasikan adanya perbaikan kondisi ekonomi, hal ini tetap menuntut peningkatan akurasi pendataan agar bantuan tetap memiliki tingkat presisi yang tinggi dalam menyasar kelompok rentan. Secara teoretis, efektivitas menyeluruh dari implementasi ini kemudian diukur menggunakan kerangka kerja model George C. Edward III yang melibatkan berbagai aktor dari tingkat pusat hingga pemerintahan desa.

Analisis Implementasi Program BLT-DD Berdasarkan Teori George C. Edward III

Keberhasilan implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kabupaten Nganjuk secara teoretis dapat dievaluasi melalui empat variabel utama dalam model George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sinergi antara keempat variabel ini menjadi determinan penting dalam menentukan efektivitas penyaluran bantuan di tingkat lokal.

1) Komunikasi

Proses diseminasi informasi kebijakan dilaksanakan oleh pemerintah desa melalui forum musyawarah desa serta pengumuman publik mengenai kriteria

penerima manfaat. Secara umum, jalur komunikasi ini telah berfungsi, namun dalam tataran praktis masih ditemukan keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap kriteria spesifik penerima bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas komunikasi kebijakan masih perlu dioptimalkan agar tidak terjadi misinterpretasi di tingkat akar rumput.

2) Sumber Daya

Implementasi program ini didukung secara finansial melalui alokasi Dana Desa yang dikelola langsung oleh pemerintah desa dengan melibatkan perangkat desa sebagai pelaksana teknis dalam pendataan dan penyaluran. Meskipun dukungan anggaran tersedia, efektivitas operasional program sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia (aparatur desa) dalam mengelola data sosial ekonomi penerima bantuan secara akurat.

3) Disposisi

Variabel ini merefleksikan komitmen serta integritas aparatur desa dalam melaksanakan verifikasi dan validasi data penerima manfaat. Sikap pelaksana kebijakan yang menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor krusial untuk memperkuat legitimasi program serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

4) Struktur Birokrasi

Mekanisme pelaksanaan BLT-DD di Kabupaten Nganjuk memiliki struktur yang jelas melalui prosedur Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang bersifat partisipatif dengan melibatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat. Kendati struktur organisasi telah mapan, penguatan koordinasi antar-lembaga tetap diperlukan guna meminimalisir risiko kesalahan penyaluran serta tumpang tindih program.

Secara komprehensif, meskipun keempat faktor tersebut telah berjalan, implementasi kebijakan ini dinilai belum sepenuhnya optimal, terutama pada aspek kualitas sumber daya manusia dan efektivitas komunikasi. Oleh karena itu, kapasitas pelaksana dan ketajaman komunikasi kebijakan tetap menjadi tantangan utama dalam menjamin ketepatan sasaran Program BLT-DD di Kabupaten Nganjuk.

Analisis Ketepatan Sasaran Program BLT-DD di Kabupaten Nganjuk

Akurasi penetapan target merupakan parameter fundamental dalam mengevaluasi keberhasilan implementasi program bantuan sosial. Dalam konteks Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), ketepatan sasaran merujuk pada sejauh mana distribusi bantuan mampu menjangkau rumah tangga yang secara objektif memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin atau rentan miskin sesuai regulasi yang berlaku.

Dinamika kemiskinan di Kabupaten Nganjuk menunjukkan tren penurunan yang konsisten, di mana jumlah penduduk miskin berkurang dari 115,86 ribu jiwa pada tahun 2023 menjadi 108,37 ribu jiwa pada tahun 2024, dan diproyeksikan terus menurun hingga 107,30 ribu jiwa pada tahun 2025. Selaras dengan fenomena tersebut, volume Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD juga mengalami kontraksi, yakni dari 25.316 keluarga pada tahun 2022 menjadi 19.862 keluarga

pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan bahwa proses seleksi yang dilakukan pemerintah desa melalui mekanisme verifikasi dan validasi dalam Musyawarah Desa (Musdes) menjadi semakin ketat dan selektif guna menyesuaikan dengan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat.

Meskipun secara umum implementasi program di Kabupaten Nganjuk dinilai telah cukup tepat sasaran karena mayoritas bantuan menjangkau kelompok masyarakat miskin dan rentan, namun dalam praktiknya masih ditemukan tantangan struktural dan manajerial. Salah satu permasalahan utama adalah disparitas antara data administratif dengan realitas ekonomi rumah tangga di lapangan. Hal ini dipicu oleh keterbatasan intensitas pembaruan data kesejahteraan sosial serta fluktuasi kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem pendataan formal.

Selain aspek teknis data, faktor kedekatan sosial di tingkat perdesaan turut menjadi variabel yang mempengaruhi objektivitas penentuan penerima bantuan. Kondisi ini memicu dua risiko kesalahan target, yaitu:

- 1) **Inclusion Error:** Pemberian bantuan kepada rumah tangga yang secara ekonomi relatif mampu. Hal ini sering disebabkan oleh penggunaan basis data yang belum diperbarui (seperti DTKS yang tidak mutakhir) serta kendala bagi aparatur desa untuk bersikap objektif di tengah relasi sosial masyarakat desa yang sangat kuat.
- 2) **Exclusion Error:** Terbaikannya rumah tangga miskin yang memenuhi kriteria dari daftar penerima manfaat. Fenomena ini biasanya terjadi akibat adanya kelompok miskin baru (misalnya akibat kehilangan pekerjaan) yang belum tercatat dalam sistem atau karena adanya bias informasi dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa.

Secara komprehensif, efektivitas penyaluran BLT-DD di Kabupaten Nganjuk sangat bergantung pada kualitas integritas data kemiskinan serta transparansi mekanisme verifikasi faktual di tingkat desa. Meskipun bantuan tunai sebesar Rp300.000 per bulan telah berkontribusi positif dalam menjaga daya beli dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penguatan pengawasan dan akurasi data tetap menjadi prasyarat mutlak agar program ini dapat memberikan dampak yang lebih optimal dan berkeadilan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Analisis Dampak BLT Dana Desa terhadap Kondisi Ekonomi Rumah Tangga di Kabupaten Nganjuk

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) diimplementasikan sebagai instrumen strategis perlindungan sosial yang bertujuan untuk memitigasi kerentanan ekonomi masyarakat miskin dan rentan. Berdasarkan regulasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, bantuan ini disalurkan dalam bentuk tunai sebesar Rp300.000 per bulan bagi setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Di Kabupaten Nganjuk, penyaluran bantuan ini menjadi salah satu upaya konkret pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan serta menjaga stabilitas daya beli masyarakat perdesaan.

Efektivitas program ini tercermin dalam data makroekonomi wilayah, di mana jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nganjuk menunjukkan tren penurunan yang konsisten, yakni dari 115,86 ribu jiwa pada tahun 2023 menjadi 108,37 ribu jiwa pada tahun 2024, dan diproyeksikan akan terus berkurang menjadi 107,30 ribu

jiwa pada tahun 2025. Penurunan statistik ini memberikan indikasi adanya perbaikan kondisi ekonomi masyarakat, meskipun intervensi kebijakan tetap diperlukan mengingat volume penduduk miskin yang masih cukup signifikan.

Secara mikro, BLT-DD memberikan dampak positif langsung terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga. Bantuan tunai tersebut dimanfaatkan oleh KPM untuk memenuhi kebutuhan fundamental, seperti pengadaan bahan pangan, kebutuhan operasional rumah tangga, serta dukungan biaya pendidikan anak. Dengan adanya subsidi tunai ini, beban pengeluaran rumah tangga dapat direduksi, sehingga masyarakat mampu mempertahankan standar konsumsi minimum mereka. Selain itu, program ini menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi ekonomi lokal. Distribusi uang tunai secara langsung di tingkat desa memicu perputaran modal di pasar-pasar tradisional dan warung lokal, yang secara tidak langsung menstimulasi pertumbuhan usaha mikro di lingkungan perdesaan.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa dampak ekonomi dari BLT-DD cenderung bersifat jangka pendek dan paliatif. Mengingat nominal bantuan yang relatif terbatas, program ini lebih berfungsi sebagai jaring pengaman untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan belum sepenuhnya mampu mentransformasi status ekonomi masyarakat menuju kemandirian permanen. Keberlanjutan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Nganjuk menuntut adanya integrasi antara bantuan tunai dengan program pemberdayaan ekonomi yang lebih luas, seperti perluasan akses lapangan kerja, pelatihan keterampilan vokasional, serta pendampingan pengembangan usaha mikro. Dengan demikian, BLT-DD memberikan kontribusi signifikan dalam stabilitas sosial ekonomi, tetapi memerlukan sinergi kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih komprehensif untuk mencapai dampak kesejahteraan yang berkelanjutan.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kabupaten Nganjuk telah berjalan sesuai dengan kerangka regulasi yang ditetapkan, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Dinamika kemiskinan di Kabupaten Nganjuk menunjukkan tren penurunan yang positif dari 10,89 persen pada tahun 2023 menjadi 10,17 persen pada tahun 2024, yang juga diikuti oleh penurunan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara gradual. Secara makro, intervensi BLT-DD berperan sebagai jaring pengaman sosial yang efektif dalam menjaga stabilitas daya beli dan membantu pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga miskin.

Namun demikian, ditinjau dari teori implementasi George C. Edward III, pelaksanaan program ini dinilai belum sepenuhnya optimal, khususnya pada variabel sumber daya manusia dan komunikasi. Kendala utama yang ditemukan di lapangan mencakup adanya fenomena *inclusion error* dan *exclusion error* yang dipicu oleh keterbatasan pembaruan data kesejahteraan sosial (DTKS) serta faktor kedekatan sosial di tingkat desa. Dampak ekonomi yang dihasilkan oleh BLT-DD pun masih bersifat jangka pendek dan paliatif, sehingga belum mampu

mentransformasi kemandirian ekonomi masyarakat secara permanen tanpa adanya program pemberdayaan yang terintegrasi.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka diajukan beberapa saran strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Akurasi dan Integritas Data: Pemerintah Kabupaten Nganjuk bersama pemerintah desa perlu meningkatkan intensitas verifikasi dan validasi data kemiskinan secara faktual agar lebih mencerminkan realitas ekonomi terkini di lapangan. Hal ini krusial untuk meminimalisir kesalahan sasaran bantuan.
2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Pelaksana: Diperlukan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi aparatur desa guna meningkatkan kompetensi manajerial dalam pengelolaan bantuan serta memperkuat objektivitas dalam mekanisme Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).
3. Optimalisasi Komunikasi Kebijakan: Sosialisasi mengenai kriteria spesifik penerima manfaat perlu diperluas secara transparan agar masyarakat memiliki pemahaman yang komprehensif, sehingga dapat mengurangi risiko konflik sosial atau misinterpretasi di tingkat desa.
4. Integrasi Program Bantuan dan Pemberdayaan: Pemerintah daerah disarankan untuk menyinergikan bantuan tunai BLT-DD dengan program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan vokasional dan pendampingan UMKM, guna mendorong transisi masyarakat dari penerima bantuan menjadi kelompok ekonomi mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fauzan Hasibuan, C. N. (2025). KETIDAKTEPATAN SASARAN BANSOS KAJIAN NILAI KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA DI KOTA MEDAN. *Jurna Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 10748.
- Ali Khomsan, A. H. (2015). *Indikatr Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Defi Adheria Al Rassyi, E. S. (2023). IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DILIHAT DARI ASPEK KOMUNIKASI PADA KANTOR DESA PAMARANGAN KIWA KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN TABALONG. *Jurna Mahasiswa Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 412-428.
- Diana Nofita Sari, T. A. (2025). EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) PADA TAHUN 2024 DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KALURAHAN KEPEK KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL. *Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, 91-100.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Imam Bashori, T. S. (2023). Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun

- Kabupaten Aceh Tamiang. *Histeria: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora* , 1-12.
- Indonesia., K. S. ((2023)). *Pedoman Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Legi Likasri Simbolon, N. A. (2025). ANALISIS KETIDAKTEPATAN SASARAN BANTUAN SOSIAL DI KOTA MEDAN: STUDI LITERATUR TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN. *NETIZEN: JOURNAL OF SOCIETY AND BUSSINESS*, 292-300.
- Nganjuk, B. P. (2025). *Profil Kemiskinan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025*. Nganjuk: BPS Kabupaten Nganjuk.
- Yuni Hariningsih, S. C. (2024). *Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2024* . Nganjuk: BPS KABUPATEN NGANJUK/BPS-Statistics of Nganjuk Regency.